



# **EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

(Studi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang  
Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang )

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh

**HELLANDA WIDIYANTI**

NPM 21801091027



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Hellanda Widiyanti, 2022, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalondo Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing I: Dr.Nurul Umi Ati,M.AP Dosen Pembimbing II: Dr. Hayat, S.AP.,M.Si

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi serta kesehatan di Indonesia menyebabkan masyarakat cenderung memiliki pola pikir yang tidak berkembang. Sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Dengan dilaksanakannya program tersebut dijadikan sebagai bentuk harapan bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan obsevasi. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM pada Desa Tegalondo telah berjalan dengan efektif dan mampu mengentas angka kemiskinan. Hal tersebut dapat terlihat dari terjadinya perubahan signifikan yang dirasakan oleh KPM. Seperti halnya banyaknya KPM yang mengalami peningkatan pendapatan, minimalnya pengeluaran yang dikelurkan, mudahnya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tingginya anggota keluarga KPM yang memperoleh pendidikan tinggi, dan terjadinya perubahan pola pikir serta kemandirian KPM. Selain itu, adanya peran kuat Pemerintah Desa dengan melakukan kegiatan pemantauan dan pemberian fasilitas pelatihan SDM untuk KPM yang dapat digunakan sebagai bekal keterampilan. Adanya peran aktif KPM dengan mengikuti segala kegiatan pelatihan SDM dan adanya peran pendamping yang bersentuhan langsung dengan KPM, sehingga memudahkan pendamping untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penghambat selama pelaksanaan program PKH tersebut dijalankan. Selama program tersebut berjalan hambatan yang dirasakan yaitu terlambatnya pencairan dana yang terjadi dikarenakan sebab yang tidak pasti dan tidak cairnya dana peserta aktif dikarenakan tidak dilakukannya sinkronisasi data KPM oleh pihak desa.

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat**

## SUMMARY

Hellanda Widiyanti, 2022, Implementation of the Family Hope Program on the Level of Welfare of Beneficiary Families (Policy Evaluation Study of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Tegalgondo Village, Malang Regency), Advisor I: Dr.Nurul Umi Ati,M.AP Advisor II: Dr. Hayat, S.AP., M.Si

The high poverty rate and low public awareness of the importance of higher education and health in Indonesia cause people to tend to have an undeveloped mindset. So that the government makes a policy to encourage changes in people's mindsets and increase welfare. The implementation of the program serves as a form of hope for the government and the community. Based on this background, it is necessary to conduct research that aims to evaluate the implementation of PKH in improving the welfare of KPM.

This research was conducted using a qualitative descriptive method. Data was collected using in-depth interviews and observation. Data triangulation is done by using source triangulation. Data analysis was carried out using a model developed by Miles, Huberman, and Saldana consisting of data condensation, data display, and drawing conclusions.

The research shows that the implementation of PKH in improving the welfare of KPM in Tegalgondo Village has been running effectively and has been able to alleviate poverty. This can be seen from the significant changes felt by KPM. Like the number of KPMs who experience an increase in income, minimal expenditures, it is easy to meet the needs of food, clothing, and housing, the high number of KPM family members who get higher education, and changes in the mindset and independence of KPM. In addition, there is a strong role for the Village Government by conducting monitoring activities and providing HR training facilities for KPM that can be used as a provision of skills. The existence of an active role for KPM by participating in all human resource training activities and the role of assistants who are in direct contact with KPM, making it easier for assistants to know the actual situation in the field. However, it does not rule out the possibility of obstacles during the implementation of the PKH program. During the program running, the perceived obstacle was the delay in disbursement of funds that occurred due to uncertain reasons and the active participant's funds were not disbursed due to not synchronizing KPM data by the village.

**Keywords: Policy Evaluation, Family Hope Program, Community Welfare**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang adalah salah satu masalah paling serius yang mereka hadapi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk kurangnya akses, pendapatan, pengeluaran subsisten, kerentanan penyakit, hutang dan piutang serta dalam beberapa kasus tertentu orang menjual barang-barang berharga mereka untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Putri dkk, 2021: 33).

Di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah utama yang sulit untuk diberantas dan memerlukan penanganan khusus agar dapat ditangani dengan baik, serta menjadi urusan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana perlu dilakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menekan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan pemerintah menciptakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menangani kemiskinan ini dan tidak ada kesenjangan di masyarakat (Umi Kalsum dkk, 2019: 70). Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang tergolong miskin

dan memiliki taraf hidup yang rendah. Karena kemiskinan dapat berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan sosial dan tingginya angka kematian, maka diperlukan adanya solusi agar kemiskinan di Indonesia ini dapat teratasi dengan baik (Misdawanti & Sari: 2013: 147).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 kemiskinan didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi. Hal ini tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) bahwa kondisi yang dikatakan miskin juga berlaku bagi orang-orang yang bekerja dan memiliki sumber pendapatan. Namun, penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan pangan, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Standar hidup masyarakat yang bisa disebut masyarakat sejahtera di suatu wilayah, ditentukan oleh terpenuhinya semua komponen tersebut. Masyarakat dianggap miskin jika pendapatannya di bawah rata-rata dan tidak mampu menjamin keberlangsungan hidup mereka. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi kemungkinan lonjakan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah program. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah menetapkan sebuah

program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, selaku instansi Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin (KM) yang telah terdaftar sebagai KPM (KPM) program keluarga harapan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan atau siapa saja yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KPM, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018. PKH di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Kebijakan ini telah dibentuk pada tanggal 21 September 2007 dengan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan".

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan akses terhadap semua layanan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka membantu keluarga kurang mampu dalam mencapai kesejahteraan. Dengan adanya PKH ini, diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan saat ini dan untuk membantu kesejahteraan keluarga miskin dalam jangka waktu yang panjang. Karena peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan membantu keluarga miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Kebijakan PKH

merupakan salah satu program bantuan yang menyambut baik partisipasi dari berbagai kalangan. Siswa juga turut untuk berpartisipasi dalam program ini. Hal ini dilakukan untuk membantu anak-anak miskin dalam menerima pendidikan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik kedepannya.

Berdasarkan dengan hasil dari Bank Dunia dalam *World Population Review* pada tahun 2021 negara-negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu ditempati oleh negara Sudan Selatan dimana jumlah penduduk miskin mencapai 82,30%. Dimana negara termiskin selanjutnya yaitu Negara Guinea Khatulistiwa mencapai 76,80%, Madagaskar mencapai 70,70%, Guinea-Bissau mencapai 69,30%, Eritrea mencapai 69,00% serta negara-negara yang berada pada Benua Afrika.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri menurut hasil dari Badan Pusat Statistika Republik Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Menurut hasil dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,4% pada Maret 2021 dibanding sebelumnya sebesar 11,09% pada tahun 2020. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang. Pada Kabupaten Malang sendiri tingkat kemiskinan berdasarkan dengan hasil yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yang mana mencapai 276.580 jiwa pada tahun 2021.

Kabupaten Malang merupakan salah satu tempat PKH. Kabupaten Malang sendiri berada di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan

Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan (Sebelah Utara), Kabupaten Probolinggo dan Lumajang (Sebelah Timur), Samudra Indonesia (Sebelah Selatan), dan Kabupaten Blitar dan Kediri (Sebelah Barat). Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan yang meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.. Sedangkan untuk jumlah penerima PKH menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tahun 2021 jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2021 telah berkurang sebanyak 29.918 KK yang mana jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Malang pada tahun ini menjadi 72.359 KK. Salah satu kecamatan yang ikut serta dalam melaksanakan program tersebut yaitu Kecamatan Karangploso. Kecamatan Karangploso terdiri dari 9 desa yaitu Girimoyo, Tegalgondo, Ngijo, Kepuharjo, Donowarih, Ngenep, Bocek, Ampeldento, dan Tawangargo.

Penulis fokus pada satu desa yaitu Desa Tegalgondo. Desa Tegalgondo memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.087 jiwa yang mana terdiri dari 3.609 jiwa laki-laki dan sebanyak 3.478 jiwa perempuan. Sejak tahun 2013, Desa Tegalgondo telah ikut dalam melaksanakan PKH. Menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tegalgondo jumlah penerima program bantuan sosial PKH sebanyak 119 KK. Program Keluarga Harapan yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Tegalgondo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat miskin dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan baik. Pemerintah memberikan bantuan ini kepada RSTM miskin



dengan harapan masyarakat miskin dapat menyekolahkan anaknya dan memeriksakan kesehatan secara rutin.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rifqi Fauzan (2019:19) bahwa pelaksanaan PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup efektif, karena hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan taraf hidup KPM yang mana menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, kemudahan akses sangat membantu pihak desa dalam membantu mendistribusikan bantuan secara merata. Walaupun program tersebut masih terbilang tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fauzan (2019:19) adalah dalam penelitiannya menggunakan teknik evaluasi *context, input, process*, dan *product* untuk mengetahui seberapa efisien program tersebut. Selain itu, perbedaan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan dan yang penulis lakukan lebih kepada evaluasi pelaksanaan PKH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang terjadi pada Desa Tegalondo Kabupaten Malang.

Berdasarkan dengan hasil observasi penulis di lapangan diperoleh permasalahan-permasalahan ketika program keluarga harapan dilaksanakan. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: pertama, banyak masyarakat yang tidak memahami tujuan dari dibentuknya program tersebut, sehingga banyak KPM menyalahgunakan dana yang telah diberikan. Kedua, distribusi yang tidak merata dimana orang yang dianggap mampu tetap menerima PKH, tetapi mereka yang berasal dari keluarga miskin yang sangat

membutuhkan tidak menerima manfaat program tersebut. Ketiga, program keluarga harapan tidak efektif dalam membantu kesejahteraan KPM, karena KPM memiliki taraf hidup yang tetap.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah tahapan terpenting yang mana dapat mengukur sejauh mana dampak yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Menurut Edward A. Suchman (1985:89) sebagaimana dikutip Winarno (2002: 206) terdapat 6 tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu: 1) mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, 2) analisis masalah, 3) deskripsi dan standarisasi kegiatan, 4) pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, 5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau faktor lain, dan 6) beberapa indikator penentu untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pelaksanaan PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para KPM. Karena dengan adanya PKH ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para KPM agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, berdasarkan dengan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Studi Kebijakan Peraturan Menteri**

**Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalondo Kabupaten Malang )”.**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka perumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tegalondo Kabupaten Malang?

**C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan data yang mana dilakukan guna terhindar dari terjadinya bias selama proses pengambilan data. Maka dalam hal ini diperlukan adanya batasan-batasan penelitian yang difokuskan melalui batasan-batasan penelitian yang difokuskan pada indikator-indikator sebagai berikut:

**1. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tegalondo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) :**

- A. Tahapan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward A. Suchman (1985:89) sebagaimana dikutip Winarno (2002: 206) dalam Harjono(2018:33) terdapat 6 tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu:
  - a. Identifikasi tujuan program

- b. Analisis masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran perubahan
- e. Menentukan faktor perubahan
- f. Menentukan dampak yang dihasilkan

B. Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (2005) dalam Juliana (2018:21) terdapat 6 indikator yaitu :

- a. Pendapatan
- b. Pengeluaran
- c. Pendidikan
- d. Keadaan tempat tinggal
- e. Fasilitas tempat tinggal
- f. Status kepemilikan rumah

**2. Faktor pendorong dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tegalondo. Faktor pendorongnya antara lain sebagai berikut:**

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1992) sebagaimana dikutip Alman (2018) dalam Zahrawati, dkk (2018:392) yaitu:

- A. Faktor pendorong :
- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah;
  - b. Peserta yang berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

c. Pendamping yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

B. Faktor penghambat:

- a. Keterlambatan pencairan dana
- b. Dana peserta aktif tidak cair

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan KPM di Desa Tegalondo Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tegalondo Kabupaten Malang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam upaya penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini telah di dapatkan baik dalam internal kampus pada khususnya maupun dari eksternal kampus pada umumnya. Jika penelitian ini berhasil maka akan berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang efektivitas, pemerataan, hambatan dan dukungan, sertaupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalondo, Kabupaten Malang.

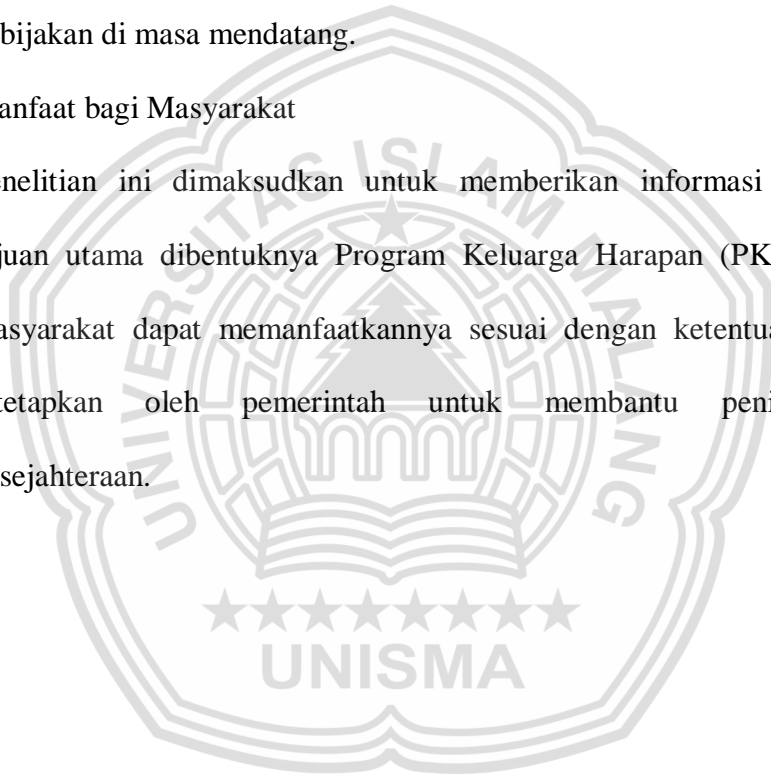
## 2. Secara Praktis

### a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang dalam hal implementasi kebijakan di masa mendatang.

### b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tujuan utama dibentuknya Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu peningkatan kesejahteraan.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis temukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan PKH pada Desa Tegalondo, Kabupaten Malang telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan KPM. Hal tersebut dapat terlihat dari terjadinya perubahan signifikan yang dirasakan oleh KPM. Seperti halnya banyaknya KPM yang mengalami peningkatan pendapatan yang mana mampu untuk memneuhi kebutuhan keluarga mereka.

Selanjutnya, minimnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh KPM, sehingga KPM tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang membengkak untuk pemenuhan kebutuhan mereka baik kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya (sandang, pangan dan papan).

Selain itu, tingginya anggota keluarga KPM yang memperoleh pendidikan tinggi. Dengan memiliki pendidikan tinggi maka mampu merubah kondisi/keadaan keluarga menjadi mengalami peningkatan kesejahteraan hidup dibandingkan sebelumnya. Hal lain yaitu terjadinya perubahan pola pikir dan kemandirian KPM sehingga dapat mendorong KPM berupaya dalam emningkatkan kesejhateraan keluarga mereka dengan membuka usaha.

Tentunya dalam pelaksanaannya sendiri terdapat faktor pendorong yang mampu mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Seperti adanya peran

kuat Pemerintah Desa dengan melakukan kegiatan pemantauan dan pemberian fasilitas pelatihan SDM untuk KPM yang dapat digunakan sebagai bekal keterampilan.

Tidak hanya itu saja, adanya peran aktif KPM dengan mengikuti segala kegiatan pelatihan SDM dan adanya peran pendamping yang bersentuhan langsung dengan KPM, sehingga memudahkan pendamping untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penghambat selama pelaksanaan program PKH tersebut dijalankan. Selama program tersebut berjalan hambatan yang dirasakan yaitu terlambatnya pencairan dana yang mengalami keterlambatan 1-2 bulan lamanya, dikarenakan sebab yang tidak pasti. Serta tidak cairnya dana peserta aktif dikarenakan tidak dilakukannya sinkronisasi data KPM oleh pihak desa sehingga menyebabkan terblokirnya kartu milik KPM.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dengan temuan penulis yang telah dipaparkan diatas, untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM pada Desa Tegalondo maka diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan. Diperlukannya keaktifan Pemerintah Desa Tegalondo untuk mencari informasi mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana, sehingga nantinya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.





Selain itu, Pemerintah Desa Tegalondo juga perlu melakukan sinkronisasi data setiap bulan guna menghindari terjadinya pemblokiran bagi KPM dan perlu diberikan penambahan akan pelatihan bagi KPM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P. D. (2022). Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. *UIN SATU Tulungagung Institutional Repository*, hlm.90.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang: <https://malangkab.bps.go.id/indicator/23/81/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses pada Minggu 24 Oktober 2021
- Chotimah, C. (2017). Persepsi Peserta Didik Tentang Pentingnya Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Pikir Motivasi dan Perilaku Sosial di MIN Pandansari Ngunut Tulungagung .*UIN Satu Tulungagung Institutional Repository*.
- Cipta Karya. *Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah Kabupaten Malang*. Retrieved from [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/D-OCRPIJM\\_1503541329BAB\\_6\\_MALANG\\_new.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/D-OCRPIJM_1503541329BAB_6_MALANG_new.pdf)
- Desrinelti, Maghfirah. A, dkk. (2021). *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*.JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol.6, No.1 , hlm. 84.
- Hadi, S. (2014). Metode Pemecahan Masalah Menurut Polya Untuk Mengembangkan Kemampuan Siswa Dalam Pemecahan Masalah Sistematis di Sekolah Menengah Pertama. *EDU-MAT Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.2, No.1*, hlm.55.
- Hajaroh, M. (2018). *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*. Foundasia, Vol.9, No.1, hlm.33.
- Hanjani, D. A. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Karyawan Outsourcing PT. Perkebunan Nusantara II Unit Kebun Sawit Seberang*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/15332-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kesejahteraan-karyawan-outsourcing-pt-pe.pdf>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Edisi Pertama. Malang: Intrans Publishing. hlm.12.

- Hayat, SH Turohman, dan Y.Cikusin. (2018). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemerintah, Vol.8, No.2, hlm.150.
- Hayat. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 40
- Hayat. (2016). *Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.20, No.2, hlm.176
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hidayat AS, Afifuddin, Hayat. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Journal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.5. hlm.33
- Herman, T. (2000). *Strategi Pemecahan Masalah (Problem-Solving) Dalam Pembelajaran Matematika*. UPI Bandung.
- Imron. (2012). *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurnal Riptek, Vol.6, No.1.
- Janati, N. (2021). *Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau*. Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1, hlm.44-49.
- Juliana. (2018). *ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS: KELURAHAN BAGIAN DELI SEBERANG, KECAMATAN MEDAN BELAWAN, KOTA MEDAN)*. hlm. 21.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*. Retrieved Januari 16, 2022, from <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007
- Kompasiana. (2015). *Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)*. Retrieved Agustus 14, 2022, from

<https://www.kompasiana.com/muhaiminmoh/552ab300f17e611530d62496/model-evaluasi-cipp-context-input-process-product>

- Kusumawati, E. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.* hlm.33
- Leiju. A, Masjaya, dkk (2014). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu).* Jurnal Administrative Reform, Vol.2, No.4 , hlm.518.
- Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* United States of America: SAGE Publication, Inc.
- Misdawita, Sari (2013). *Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia.* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. hlm.147
- Moloeng. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi Sholih, I.MH, dan Ahmad Sofwani. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.* Jurnal Review Publik. hlm.199
- Muljanto, M. A. (2015). *Mengenai Kebijakan Publik* . Retrieved Juli 25, 2022, from Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-mengenal-kebijakan-publik-2019-11-05-56228240/>
- NA, Putri. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro.* Journal Of Public And Management Review, Vol 10, No.3 , hlm.2.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nur Zaman, Syafrizal dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat.* Yayasan Kita Menulis. hlm.27
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan,* ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 20.

- Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (2018). Retrieved from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100229.pdf>
- Polya, G. (1947). *How To Solve 1, 2nd Ed.* New Jersey: Pricenton University Press.
- Purba, D. (2021). Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah. *Junral MathEdu (Mathematic Education)*, Vol.4, No.1, hlm.28.
- Putri EA, Slamet Muchsin, dan Hayat . (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kapupaten Tanah Bambu).*Jurnal Respon Publik, Vo.15, No.7, hlm.33.
- Rahayu, S. (2020).*Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan KPM (KPM) di Desa Banyusidi dan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.*Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" , hlm.33.
- RF Dwi Cahya. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*Repository IPDN , hlm.19.
- Sampurno, M. (2022). *29.918 Warga Dianggap Tak Miskin Lagi, Kemensos Cabut Bantuan Program PKH.* Retrieved Januari 14, 2022, from RADAR MALANG:<https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kanjuruhan/14/01/2022/29-918-warga-dianggap-tak-miskin-lagi-kemensos-cabut-bantuan-program-pkh/>
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.120
- Suharmiati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol.15, No.3.
- Susanto, H. (2016). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. hlm.23
- Susanto, I. (2019). *Program Keluarga Harapan.* Retrieved Oktober 15, 2021, from KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>



Tarsidi, D. (2016). Kesempatan dan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Makalah, Universitas Pendidikan Indonesia,td.*

Tanujaya, C. (2017). PERANCANGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE PRODUKSI PADA PERUSAHAAN COFFEEIN. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* , hlm.93.

Undang-Undang No.24 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Umi Kalsum, Nurul Umi Ati, dan Hayat. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Ampelgading Tamansari 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. Jurnal Vol. 13, No.6, hlm. 70.

Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.hlm.12

Wisnubroto, K. (2021). *Program Keluarga Harapan (PKH) 2021*. Retrieved Januari 11, 2022, from Indonesia.go.id: <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimanya>

World Bank. *Poverty Rate by Country 2022*. Retrieved Februari 23, 2022, from World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poverty-rate-by-country>

Zahrawati, D. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malmpah Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education, Vol.1, No.4*, hlm.392.